



Khulafaurrasyidin in the Shadow of Conflict: a Critical Study of the Transition of Power After the Prophet

Khulafaurrasyidin dalam Bayang-bayang Konflik: Kajian Kritis Terhadap Transisi Kekuasaan Pasca Nabi

Yosa Wananda^{1),*}, Kholid Mawardi²⁾

¹⁾UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

*Correspondence: rasyawananda@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to critically examine the historical dynamics of the Khulafaur Rasyidin period as the initial phase of the formation of the Islamic government system. The four caliphs Abu Bakar, Umar, Uthman, and Ali ruled in a highly diverse and tense socio-political context. Analysis shows that this period was not entirely stable and harmonious, but rather fraught with internal crises such as elite conflicts, regional rebellions, and social fragmentation. Uthman bin Affan's leadership was marked by nepotism and public discontent that sparked open rebellion, while Ali bin Abi Talib's reign took place amid civil war and the emergence of armed opposition movements such as the Khawarij. This study utilises a historical-critical approach with classical Islamic sources and narrative analysis of power dynamics to demonstrate that the history of the Khulafaur Rasyidin needs to be understood in a more contextual manner. The results of this research are expected to enrich the discourse on Islamic political history by emphasising the importance of examining the complexity of social realities and the challenges of post Prophet governance.

Keywords: Khulafaurrasyidin, Historiography, Crisis of Legitimacy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dinamika sejarah masa Khulafaur Rasyidin sebagai fase awal pembentukan sistem pemerintahan Islam. Keempat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali memerintah dalam konteks sosial-politik yang sangat beragam dan penuh ketegangan. Analisis menunjukkan bahwa periode tersebut tidak sepenuhnya stabil dan harmonis, melainkan sarat dengan krisis internal seperti konflik elite, pemberontakan daerah, serta fragmentasi sosial. Kepemimpinan Utsman bin Affan ditandai oleh praktik nepotisme dan ketidakpuasan publik yang memicu pemberontakan terbuka, sementara pemerintahan Ali bin Abi Thalib berlangsung di tengah perang saudara dan munculnya gerakan-gerakan oposisi bersenjata seperti Khawarij. Studi ini memanfaatkan pendekatan historis-kritis dengan sumber-sumber klasik Islam serta analisis naratif terhadap dinamika kekuasaan, guna memperlihatkan bahwa sejarah Khulafaur Rasyidin perlu dipahami secara lebih kontekstual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana sejarah politik Islam dengan menekankan pentingnya telaah atas kompleksitas realitas sosial dan tantangan pemerintahan pasca Nabi..

Kata Kunci: Khulafaurrasyidin, Historiografi, Krisis Legitimasi

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Wafatnya Nabi Muhammad Saw. pada tahun 632 M menandai momen yang sangat kritis dalam sejarah Islam, tidak hanya membawa duka mendalam bagi umat Muslim, tetapi juga menciptakan kekosongan kepemimpinan yang serius. Wafatnya Nabi efeknya jauh lebih dalam dari sekedar kehilangan seorang pemimpin spiritual, umat Islam kehilangan figur sentral yang menjadi tiang penyangga dalam struktur sosial dan politik yang baru terbentuk. (Sayfullah et al., 2024) Tidak adanya wasiat eksplisit mengenai penerus kepemimpinan Nabi, memicu perdebatan antar para sahabat. Sehingga pemakaman Nabi Muhammad Saw. merupakan soal

kedua bagi mereka. Dalam konteks ini, umat Muslim yang semula solid sebagai entitas religius dan sosial, terjebak dalam transfiksasi politik dan teologis yang berkepanjangan. Sejarah menunjukkan bahwa umat Islam di Madinah pada saat itu harus melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan pemimpin, tanpa adanya petunjuk yang jelas dari Al Qur'an maupun hadis.(Abdullah, 2021)

Situasi ini membuka ruang untuk pembentukan lembaga khilafah, yang menjadi bentuk kepemimpinan umat Islam pasca kenabian. Pemikiran mengenai khilafah sangat penting, mengingat ia akan mempengaruhi sistem pemerintahan dan struktur sosial umat Islam di masa depan. Analisis menunjukkan bahwa khalifah pertama yang terpilih, Abu Bakar ash-Shiddiq dihadapkan pada tantangan dalam mengkonsolidasi kepemimpinan dan menghindari perpecahan di kalangan umat Islam. Sebagai respons, Abu Bakar mengimplementasikan konsep khilafah sebagai perwujudan dari diangkatnya pemimpin berdasarkan musyawarah dan konsensus.(Sari & Pratama, 2022)

Dalam konteks kepemimpinan Islam, penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama di Saqifah Bani Sa'idah merupakan titik awal yang signifikan dalam sejarah kepemimpinan umat Islam. Proses ini tidak hanya melibatkan musyawarah, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks antara dua kelompok utama, yakni *Muhajirin* dan *Anshor*. Abu Bakar dipilih bukan hanya karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad Saw. tetapi juga karena kepribadiannya dan dukungan dari para sahabat yang memahami pentingnya menjaga persatuan umat pasca wafatnya Nabi.(Hidayat et al., 2024)

Periode khulafaurrasyidin sering dianggap sebagai zaman ideal dalam sejarah Islam, di mana kekuasaan dipersepsikan bukan hanya sebagai lembaga politik, melainkan juga sebagai manifestasi nilai-nilai ketauhidan, keadilan sosial, dan kesalehan moral. Pelbagai narasi sejarah klasik, termasuk yang ditulis oleh sejarawan seperti at-Thabari dan Ibnu Ishaq, memberikan kesan bahwa para khalifah pertama adalah pewaris spiritual Nabi Muhammad Saw. yang tidak mungkin keliru dalam pengambilan kebijakan. Namun, narasi ini bukan tanpa kritik, mengingat proses penulisan sejarah seringkali dipengaruhi oleh konteks politik dan kepentingan tertentu, terutama dalam periode setelah khulafaurrasyidin, seperti masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang memiliki kepentingan untuk membenarkan legitimasi kekuasaan mereka melalui glorifikasi masa lalu.(Musthafa, 2021)

Narasi sejarah Islam acapkali mengandalkan pandangan romantis dan idealis tentang masa khulafaurrasyidin, menggambarkan mereka sebagai pemimpin yang bebas dari kesalahan serta penyalahgunaan kekuasaan. Namun, jika kita mendalami fakta-fakta sejarah dengan pendekatan yang lebih kritis, maka kita akan menjumpai sejumlah realitas yang kompleks dan terkadang kontras dengan penggambaran kebanyakan masyarakat. Khulafaurrasyidin memang terkenal dengan nilai-nilai keadilan dan kesalehan, namun dalam kepemimpinan mereka terdapat juga konflik dan pertentangan yang signifikan.(Qomariah & Aiman, 2022)

Di dalam konteks pendidikan sejarah, penting untuk menjelaskan kepada generasi muda bahwa pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap era khulafaurrasyidin tidak hanya mencakup pencapaian mereka saja, tetapi juga tantangan dan kontroversi yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan historis kritis diperlukan untuk menyoediki lebih dalam mengenai penerapan nilai-nilai kepemimpinan, pemerintahan, dan sosial yang diajarkan oleh khulafaurrasyidin dalam konteks masyarakat modern.

Dari paparan di atas, artikel ini akan difokuskan pada permasalahan, bagaimana proses transisi kekuasaan pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. dan bagaimana konflik yang terjadi selama periode khulafaurrasyidin. Kajian ini tidak bertujuan untuk mendiskreditkan tokoh sejarah ataupun khulafaurrasyidin, melainkan untuk menyajikan pemahaman yang lebih kredibel dan berdasarkan realita terhadap sejarah umat Islam. Dengan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Islam yang kritis, inklusif, dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan historiografi kritis, guna menelusuri dinamika transisi kekuasaan pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. dalam periode khulafaurrasyidin. Metode ini digunakan untuk mengkaji tidak hanya peristiwa sejarah secara kronologis, tetapi juga bagaimana narasi-narasi sejarah tersebut dikonstruksi dan diwariskan dengan kepentingan ideologis tertentu.

Pendekatan historiografi kritis menekankan bahwa penulisan sejarah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang mencerminkan konteks sosial, politik, dan teologis. Dalam hal ini, penelitian tidak hanya ditujukan

untuk memaparkan fakta sejarah saja, tetapi lebih penting lagi untuk menggali proses pembentukan narasi yang acapkali berlandaskan pada kekuasaan dominan, serta mengidentifikasi adanya bias dalam penulisan tersebut.

Untuk menganalisis konsep legitimasi dalam transisi kekuasaan pada masa khulafaurrasyidin, kajian ini menggunakan teori legitimasi kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber membedakan tiga bentuk otoritas, yakni tradisional, karismatik, dan rasional legal. Otoritas tradisional di dalam masyarakat Islam awal sangat tergambarkan dalam praktik bai'at, di mana para tokoh atau pemimpin yang terpilih mendapatkan status dan kekuasaan berdasarkan tradisi dan kesepakatan komunitas, para khalifah dianggap suci dan sangat dihormati. (Mubarok & Widiyanto, 2021)

Di sisi lain, dalam proses bai'at juga memperlihatkan elemen otoritas karismatik, di mana pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar memiliki daya tarik pribadi yang membuat para pengikutnya rela memberikan dukungan penuh kepada mereka. (Mubarok & Widiyanto, 2021) Selanjutnya, legitimasi kekuasaan juga dapat dipandang dari perspektif otoritas rasional legal, di mana prinsip hukum dan keadilan menjadi landasan bagi kekuasaan yang sah. (Mokhammad Samsul Arif, 2020) Dalam konteks khulafaurrasyidin, pasca terbunuhnya Umar, proses suksesi kepemimpinan tidak hanya melibatkan keyakinan pribadi para sahabat elit, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan berdasarkan hukum syariah dan kesepakatan khalayak umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transisi Kekuasaan: Dari Nabi Muhammad Saw. kepada Abu Bakar ash-Shiddiq

Nabi Muhammad adalah pemimpin keagamaan dan pemimpin politik sekaligus. Beliau adalah Nabi terakhir, tidak mungkin ada Nabi sepeninggal beliau. Artinya, posisi sebagai pemimpin keagamaan (setingkat Nabi) tidak mungkin ada yang meneruskan, tetapi sebagai pemimpin politik (setingkat kepala negara) dapat saja digantikan dan diteruskan oleh sahabat beliau. (Hosen, 2018) Wafatnya Nabi Muhammad membuat Madinah bising dengan tangisan. Umatpun bertanya-tanya siapa yang menjadi pemimpin mereka. Sementara itu, Beliau tidak meninggalkan pesan atau tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan Beliau sebagai pemimpin umat. Tentunya ini menjadi perdebatan diantara para sahabat.

Pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, terjadi tepat dua hari setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Pertemuan ini menunjukkan kompleksitas dinamika politik umat Islam awal, saat itu terdapat dua kelompok besar, yaitu *Anshar* dan *Muhajirin* yang berupaya untuk memperebutkan kekuasaan politik. Kaum *Anshar* dikomandoi oleh Sa'ad bin Ubadah, dengan membawa ide kepemimpinan bersama, di mana posisi kepemimpinan diharapkan dapat dibagi antara *Anshar* dan *Muhajirin*. Namun, gagasan ini ditolak oleh tokoh-tokoh dari *Muhajirin* seperti Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. (Harianto, 2023) Dalam kondisi perdebatan panas tersebut kemudian Abu Bakar ash-Shiddiq muncul memberikan argumennya, Abu Bakar mendasarkan argumennya pada sabda Rasul yang menghendaki bahwa pemimpin itu harus dari suku Quraisy, karena apabila pemimpin dipilih dari kaum *Anshar* dikhawatirkan terjadi perdebatan lanjutan antara suku *Khazraj* dan suku *Auf* yang selalu bermusuhan sebelumnya. Atas dasar argumentasi tersebut Abu Bakar mengusulkan opsi antara Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Nampaknya, umat Muslim saat itu tertarik dengan argument Abu Bakar. Kemudian Umar menghampiri Abu Bakar dan berbai'at kepadanya. Lalu kaum musliminpun mengikutinya. (Ekaviana, 2021)

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji siapa saja yang hadir dalam Saqifah dan apakah forum tersebut mencerminkan konsensus seluruh umat. Sebagaimana besar yang hadir adalah elit politik yang mewakili kelompok tertentu, sedangkan tokoh penting seperti Ali bin Abi Thalib dan beberapa anggota Ahlul Bait tidak hadir dalam pertemuan tersebut. (Rahmad & Santalia, 2025) Hal ini menimbulkan keraguan akan legitimasi proses bai'at Abu Bakar yang diyakini sebagai hasil musyawarah. Sebagian kalangan berpendapat bahwa peristiwa ini lebih mirip dengan tindakan darurat dari elit politik untuk mencegah perpecahan umat Muslim dan menjaga dominasi Quraisy dalam struktur kepemimpinan baru. (Anis, 2020)

Jika dianalisis dari sudut pandang teori legitimasi Max Weber, maka pengangkatan Abu Bakar merupakan peralihan dari otoritas karismatik (Nabi) menuju otoritas tradisional. Otoritas karismatik yang dimiliki Nabi Muhammad Saw. dikarenakan kepemimpinannya yang diakui oleh umat, dan memberikan landasan yang kuat bagi kelangsungan kepemimpinan di kalangan Quraisy, yang pada masa itu berfungsi sebagai elit politik. Pengangkatan Abu Bakar, yang dilakukan dalam konteks Saqifah, menunjukkan bahwa meski terdapat unsur

karismatik, legitimasi yang terbangun lebih ke arah otoritas tradisional, di mana posisi Abu Bakar sebagai figur yang dihormati berfungsi untuk mempertahankan dominasi Quraisy di kalangan kaum Muslim yang lebih luas.(Purkon, 2023)

Oleh karena itu, proses Saqifah tidak dapat dilihat sebagai model ideal demokrasi awal. Sebaliknya, ia mencerminkan kondisi darurat dan realitas politik yang pragmatis, di mana stabilitas jangka pendek diutamakan, meskipun mengorbankan keputusan jangka panjang. Akibatnya, sisa-sisa konflik tidak diselesaikan pada saat itu dan kemudian muncul di kemudian hari dalam bentuk pemberontakan terhadap Ustman, Perang Jamal, Perang Shiffin, hingga fragmentasi teologis dalam sejarah Islam.

Konflik dan Ketegangan dalam Pemerintahan Khulafaurasyidin

Periode khulafaurasyidin kerap disebut sebagai era keemasan dalam sejarah politik Islam. Namun, ketika dikaji secara kritis terhadap dinamika internal yang terjadi justru menunjukkan bahwa masa ini dipenuhi dengan konflik serius, ketegangan politik, bahkan kekerasan yang meruntuhkan kesatuan umat. Alih-alih sebagai masa stabilitas dan kemakmuran ideal, periode ini justru menjadi titik awal bagi perpecahan politik dan teologis yang berdampak panjang bagi sejarah Islam.

Umar bin Khattab

Masa kepemimpinan Umar bin Khattab (634-644 M) sering didengungkan sebagai tonggak penting dalam pembentukan struktur administrasi negara Islam yang terorganisir dan efektif. Di bawah kepemimpinannya, Umar membangun lembaga-lembaga vital yang bertujuan untuk memperluas kekuatan politik Islam dan mengkonsolidasikan pemerintahan secara lebih sistematis. Salah satu inovasi besar yang dilakukan oleh Umar adalah pembentukan lembaga *diwan* yang bertugas mengelola pencatatan gaji militer serta urusan fiskal, sehingga memperbaiki pengelolaan sumber daya negara.(Rifky et al., 2023)

Namun, di balik narasi indah tersebut, tersembunyi sejumlah kontradiksi serta dinamika sosial politik. Sebagaimana diketahui, komunitas Islam yang awalnya terpusat di Madinah, dikarenakan ekspansi yang massif ke wilayah Bizantium dan Persia, maka bertransformasi menjadi sebuah imperium yang lebih kompleks dan multikultural. Proses ini menciptakan tantangan dalam hal pengelolaan struktur administratif dalam kelompok masyarakat yang baru terbentuk.(Rifky et al., 2023) Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tidak disertai dengan integrasi ideologi di antara penduduk setempat. Ketaatan yang ditunjukkan oleh wilayah yang ditaklukkan lebih bersifat administratif dan militer tanpa adanya internalisasi nilai-nilai keislaman. Dalam banyak kasus, kekuasaan pusat dianggap sebagai entitas luar yang dominan namun asing secara budaya. Di sinilah letak celah yang memicu potensi resistensi di antara kelompok non-Arab.(Pratama & Sujati, 2018)

Gaya kepemimpinan Umar dikenal sangat sentralistik, meskipun Umar berdalih demi semangat keadilan. Umar memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap para gubernurnya, menerapkan control yang begitu detail termasuk pengawasan terhadap aset dan larangan bagi sahabat senior untuk tinggal di luar Hijaz. Langkah-langkah yang diambil ini, meskipun bertujuan untuk melindungi stabilitas kekuasaan, justru memicu ketegangan di kalangan elit Quraisy. Hal ini dikarenakan mereka merasa posisi dan pengaruh politik mereka terancam.(Pratama & Sujati, 2018)

Hanya saja, kebijakan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab membawanya ke dalam petaka kematian (*syahid*) akibat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi pada tahun 644 M. Peristiwa ini lahir akibat dari ketegangan sosial politik pasca penaklukan wilayah non-Arab, khususnya Persia. Pada konteks ini, Abu Lu'lu'ah adalah seorang budak dari Mughirah bin Syub'ah yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang terpusat di Madinah. Sumber Sejarah menyebutkan bahwa Abu Lu'lu'ah mengeluhkan beban kerja dan pajak yang dibebankan padanya oleh tuannya dan ketika ia menghadap kepada Umar, permohonannya ditolak. Atas dasar sakit hati itulah, Abu Lu'lu'ah melakukan penyerangan terhadap Umar bin Khattab.(Rifky et al., 2023) Jika kita pahami secara mendalam, keluhan Abu Lu'lu'ah ini mewakili suara ketidakpuasan dari kelompok tertindas dan terpinggirkan, khususnya non-Arab yang menjadi warga kelas dua dalam sistem sosial politik Islam awal.

Utsman bin Affan

Kematian Umar bin Khattab membawa dampak signifikan tidak hanya pada kekosongan kekuasaan yang tinggi, tetapi juga pada kondisi sistem kekhilafahan yang menjadi rapuh dan penuh tekanan. Ketika Umar bin

Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ia telah menginisiasi pembentukan majelis syura yang terdiri dari enam tokoh penting, termasuk para sahabat Nabi Muhammad yang berpengalaman dan berasal dari kalangan Quraisy. Majelis ini bertujuan untuk memilih penerus sebagai khalifah baru, dan anggotanya—Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf—ditentukan dengan pertimbangan yang bernuansa politis yang kuat, bukan dengan mengedepankan ide demokrasi yang ideal.(Rifky et al., 2023)

Proses pemilihan ini terjadi dalam suasana yang penuh dengan ketegangan dan tekanan waktu, dengan hanya tiga individu yang mendapatkan perhatian khusus: Ali, Utsman, dan Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf akhirnya menarik diri dan bertindak sebagai "kingmaker," memperlihatkan dinamika kompleks dalam proses pemilihan tersebut. Utsman bin Affan terpilih karena dianggap lebih tua dan tidak konfrontatif, yang diharapkan dapat menjaga stabilitas di tengah situasi yang rawan potensi konflik di antara faksi-faksi yang ada dalam bangsa Quraisy.(Rifky et al., 2023)

Namun, penunjukan Utsman menyimpan kompromi politik yang menyisakan residu konflik. Dalam debat internal majelis, salah satu isu kunci adalah: *apakah khalifah baru akan memerintah murni berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, atau juga berdasarkan ijtihad pendahulunya?* Ali dikabarkan bersikukuh akan memerintah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah saja, sedangkan Utsman bersedia menerima pula tradisi dua khalifah sebelumnya (Abu Bakar dan Umar). Hal ini menandai perbedaan prinsip dalam pendekatan kekuasaan Ali lebih transformatif, Utsman lebih akomodatif terhadap warisan status quo.(Qomariah & Aiman, 2022)

Segera setelah dilantik, Utsman mulai mengonsolidasikan kekuasaan dan mengangkat anggota keluarganya dari Bani Umayyah ke posisi strategis, dengan pengangkatan Mu'awiyah sebagai gubernur Syam dan Marwan bin al-Hakam sebagai sekretaris pribadinya sebagai contoh nyata. Praktek nepotisme ini memicu kritik tajam dan mengalihkan arah reformasi yang telah mulai ditegakkan oleh Umar bin Khattab, yang berusaha mengurangi dominasi aristokrasi Quraisy dalam posisi kekuasaan. Penunjukan tokoh-tokoh dari klan Umayyah mencerminkan bagaimana kekuatan klan dapat memengaruhi politik, seringkali mengesampingkan mekanisme demokratis dan akses bagi individu dari kelompok lain.(Qomariah & Aiman, 2022)

Sebagai konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut, kekuasaan mulai terfokus di tangan beberapa klan, menciptakan ketidakpuasan di kalangan segmen-segmen lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh klan dalam struktur politik sering kali dapat menutup akses bagi masyarakat luas dan memperkuat dominasi kelompok tertentu atas yang lain. Dalam konteks Utsman, langkah-langkahnya menandai awal dari ketidakstabilan yang akan mengarah pada konflik internal yang lebih dalam, termasuk perpecahan yang mengganggu stabilitas umat Islam setelah masa kepemimpinannya.(Al Ayyubi et al., 2024)

Krisis ini semakin diperparah oleh ketimpangan distribusi kekayaan. Wilayah yang baru ditaklukkan menghasilkan kekayaan besar, tetapi distribusinya sangat tidak merata. Pemerintahan Utsman mengadopsi sistem pemberian tanah dan gaji yang lebih menguntungkan elite tertentu, termasuk para kerabatnya, sementara rakyat biasa, khususnya di wilayah Kufah, Basrah, dan Mesir, mulai mengalami tekanan ekonomi. Dalam konteks inilah, ketidakpuasan sosial mulai terorganisasi menjadi gerakan protes yang bersifat politis dan ideologis.

Krisis legitimasi yang mengarah kepada pemberontakan bersenjata terhadap Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu titik kritis dalam sejarah politik Islam. Pemberontakan ini muncul dari berbagai wilayah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah, di mana para pemberontak mengepung rumah Utsman di Madinah selama sejumlah minggu. Meskipun beberapa sahabat Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awwam, berusaha untuk menjadi mediator dalam konflik ini, situasi sudah tidak terkendali lagi. Ini menunjukkan betapa dalamnya ketidakpuasan yang dirasakan oleh sebagian umat Islam terhadap kepemimpinan Utsman, di mana hal ini kemudian berujung pada pembunuhan Utsman saat ia membaca Al-Qur'an, menciptakan trauma kolektif di kalangan umat Islam karena untuk pertama kalinya seorang khalifah yang merupakan menantu Rasulullah dibunuh oleh orang-orang Islam sendiri. Pembunuhan Utsman menandai runtuhnya otoritas simbolis dari kekhilafahan, yang memberikan dampak mendalam terhadap stabilitas politik Islam.(Satiadharmanto et al., 2024)

Ali bin Abi Thalib

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib (656–661 M) muncul dalam situasi politik yang sangat genting—sebuah warisan krisis struktural dari masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Ali tidak naik sebagai khalifah dalam

suasana damai atau melalui proses musyawarah yang luas, melainkan di tengah gelombang pemberontakan yang baru saja meruntuhkan otoritas khalifah sebelumnya. Dengan latar belakang inilah, Ali menghadapi tantangan terberat dalam sejarah kekhalifahan Islam awal: mempersatukan umat dalam kondisi keterbelahan, menyatukan wilayah-wilayah yang mulai membangkang, dan memulihkan legitimasi moral kekuasaan Islam.

Ali bin Abi Thalib, setelah dilantik sebagai khalifah, menghadapi situasi yang sangat rumit dan penuh tantangan, terutama seusai pembunuhan Utsman bin Affan. Konflik internal di dalam tubuh Islam semakin meningkat, dan meskipun ia mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Talhah, Zubair, dan Aisyah, dukungan tersebut sering kali dianggap bersifat politis. Banyak yang menuding Ali atas pembunuhan Utsman, baik secara langsung maupun tidak, dengan menganggapnya sebagai pemimpin yang gagal dalam mencegah atau memperkarakan para pelaku pembunuhan tersebut.(Junaidin, 2020)

Ali menghadapi dilema: di satu sisi, ia harus menindak pelaku kejahatan untuk menjaga integritas kekhalifahan, tetapi di sisi lain, ia tidak memiliki kontrol penuh atas aparat pemerintahan dan militernya. Oleh karena itu, Ali berusaha untuk menyusun langkah-langkah strategis yang sistematis untuk menstabilkan situasi sebelum mengambil tindakan hukum yang tegas. Namun, pendekatan ini ditanggapi sebagai kelambanan atau bahkan ketidaktegasan. Akibatnya, dalam waktu singkat, Ali harus menghadapi oposisi bersenjata dari internal umat Islam sendiri.(Aldzakhiroh et al., 2024)

Ketegangan mencapai puncaknya dalam Perang Jamal, yang melibatkan tiga tokoh besar: Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Mereka berkolaborasi untuk menuntut keadilan atas pembunuhan Khalifah Utsman. Ketidakpuasan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dianggap lambat dalam menindak para pelaku pembunuhan Utsman, memicu mobilisasi pasukan oleh para elite ini untuk melawan pemerintahannya. Perang ini menandai pertikaian di antara generasi pertama Islam yang sebelumnya bersatu dalam misi kenabian, menunjukkan betapa dalamnya perpecahan di dalam komunitas Muslim.(Munawira et al., 2024)

Meskipun Ali akhirnya berhasil dalam pertempuran, hasilnya tidak membawa kedamaian dan persatuan di kalangan umat Islam. Sebaliknya, Perang Jamal memperdalam luka-luka yang ada dan menonjolkan krisis legitimasi kepemimpinan Ali. Ribuan Muslim tewas dalam pertempuran ini, dan perpecahan yang terjadi menyebabkan hilangnya rasa persatuan di kalangan komunitas Muslim. Sebagaimana terlihat dalam analisis sejarah, konflik ini mengubah persepsi tentang kekhalifahan Ali sehingga dianggap tidak lagi mewakili kepentingan umum umat.(Munawira et al., 2024)

Krisis tidak berhenti di Perang Jamal. Tantangan yang lebih besar datang dari Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam dan kerabat Utsman. Konflik yang dipicu oleh pembunuhan Utsman bin Affan dan penolakan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sangat krusial bagi perkembangan politik Islam. Muawiyah menegaskan bahwa Ali belum mengambil tindakan terhadap para pembunuh Utsman, yang menambah bobot moral pada penolakannya, tetapi sebenarnya, ambisi politik Muawiyah yang ingin mengukuhkan kekuasaan otonom Syam menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap pusat kekuasaan di Madinah dan Kufah.(Miftakur Ridlo & Moch. Yunus, 2022)

Pertempuran di Shiffin berlangsung selama beberapa hari dan menimbulkan banyak korban, menciptakan ketegangan yang lebih dalam di antara umat Islam. Saat pasukan Muawiyah terdesak, mereka mengangkat mushaf Al-Qur'an sebagai isyarat seruan damai, yang mengarah pada keputusan arbitrase (tahkim) antara kedua pihak. Sayangnya, hasil tahkim dianggap merugikan posisi Ali karena Abu Musa al-Asy'ari, arbitrator dari pihak Ali, dinilai tidak cukup tegas dibandingkan 'Amr bin al-'Ash dari pihak Muawiyah. Keputusan ini dikenang oleh banyak pendukung Ali sebagai kesalahan strategis yang membawa dampak buruk bagi kekhalifahan dan menguatkan posisi Muawiyah.(Miftakur Ridho, 2019)

Kekecewaan terhadap hasil tahkim menciptakan friksi lebih jauh dalam komunitas Muslim. Dari kalangan pendukung Ali, muncul kelompok Khawarij yang memisahkan diri, menuduh Ali telah menyimpang dari hukum Allah dengan menerima arbitrase manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan politik di saat krisis dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius, memperburuk perpecahan internal dan menciptakan garis pemisah ideologis yang signifikan dalam sejarah Islam. Kelompok Khawarij kemudian berkelanjutan dengan serangkaian pemberontakan, menandakan dinamika politik yang rumit dan berimplikasi jangka panjang bagi struktur kekuasaan di kalangan umat Islam.(Miftakur Ridho, 2019)

Dalam suasana penuh dengan kekecewaan dan amarah, para pemimpin Khawarij mengadakan pertemuan

rahasia di Kufah. Dalam pertemuan itu, lahirlah rencana besar untuk membunuh secara serempak tiga tokoh penting yang mereka nilai sebagai biang kerok perpecahan umat, yakni: Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan 'Amr bin al-'Ash. (Sriwahyuni et al., 2023) Namun, dari tiga target tersebut hanya Ali bin Abi Thalib yang terbunuh, pembunuhnya yakni Abdurrahman bin Muljam seorang Khawarij dari Mesir. Sementara itu, Muawiyah bin Abu Sufyan dan 'Amr bin al-'Ash selamat dari rencana pembunuhan tersebut. Hal ini dikarenakan pelaku penyerangan terhadap Muawiyah yakni al-Barak bin Abdullah at-Tamimi hanya berhasil melukai Muawiyah, dan pelaku yang ditugaskan untuk membunuh 'Amr bin al-'Ash, yakni 'Amr bin Bakr at-Tamimi malah salah sasaran, ia membunuh Khallad bin Amr, yang sedang menjadi imam sholat menggantikan 'Amr bin al-'Ash.

Periode Ali bin Abi Thalib menandai puncak dari fitnah kubro—sebuah istilah dalam tradisi Islam yang merujuk pada perpecahan besar dalam tubuh umat. Perpecahan ini bukan hanya politis, tetapi juga teologis dan ideologis, yang kelak akan melahirkan tiga kutub utama: Sunni, Syiah, dan Khawarij. Setiap kelompok ini mengembangkan legitimasi serta pandangan hukum dan teologi yang berbeda, yang mencirikan perpecahan yang terjadi.

Sunni menganggap legitimasi politik didasarkan pada konsensus umat serta tradisi kekhalfahan, yang diakses dari pemahaman kolektif sejarah Islam yang dibangun dari para sahabat Nabi. (Diyarti et al., 2024) Di sisi lain, Syiah menekankan bahwa kekuasaan harus berada di tangan Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad, sebagai bentuk kepercayaan bahwa mereka adalah pewaris yang sah. Kelompok ini memainkan peran penting dalam mengembangkan intelektual yang berfokus pada kajian hadits dan keilmuan, mendorong praktik teologis yang berbeda. (Zulfikar & Santalia, 2024)

Sementara itu, Khawarij, yang mendeklarasikan tuntutan bahwa kekuasaan harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar adil, menjadikan dasar keadilan sebagai landasan keberlanjutan kekuasaan dalam Islam. Ini menimbulkan ajaran yang lebih ketat dan sering kali berujung pada konflik dengan kedua kubu lainnya. Tiga kutub ini terus melahirkan dialog, ketegangan, dan juga konflik yang berlanjut hingga saat ini, menunjukkan signifikansi historis dari Fitnah Kubro dalam membentuk identitas dan kelompok dalam agama Islam. (Zulfikar & Santalia, 2024)

Kekhalifahan Ali adalah pergulatan antara idealisme dan realitas sejarah. Ia adalah simbol keadilan, ilmu, dan keberanian, tetapi juga pemimpin yang terlilit dalam dinamika kekuasaan yang sudah terlalu retak. Kepemimpinan Ali bukan gagal karena kelemahan personal, melainkan karena ia mewarisi sistem yang telah rapuh secara struktural dan terbelah secara sosial-politik sejak masa Utsman. Dengan wafatnya Ali akibat pembunuhan oleh kaum Khawarij di Kufah, berakhirilah secara simbolik model kekhalfahan berdasarkan moralitas kenabian, dan dimulailah era kekuasaan dinasti, yang dimulai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri Dinasti Umayyah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masa Khulafaur Rasyidin, yang selama ini direpresentasikan sebagai periode ideal dalam sejarah Islam, sejatinya merupakan fase yang kompleks dan sarat dinamika politik, sosial, dan teologis. Setiap khalifah menghadapi tantangan khas, mulai dari konsolidasi kekuasaan, ekspansi wilayah, hingga konflik internal dan delegitimasi politik. Narasi idealistik yang berkembang tentang keempat khalifah cenderung dibentuk secara retrospektif oleh tradisi Sunni sebagai bentuk legitimasi normatif terhadap sistem kekhalfahan. Namun, melalui pendekatan historis-kritis, terungkap bahwa realitas sejarah memperlihatkan terjadinya nepotisme, pemberontakan sosial, serta kekerasan politik yang memuncak pada perpecahan umat. Pembunuhan terhadap Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, serta lahirnya gerakan Khawarij, mencerminkan krisis otoritas dan kegagalan struktur politik Islam awal dalam merespons kompleksitas masyarakat Muslim yang terus berkembang. Dengan demikian, narasi Khulafaur Rasyidin perlu dipahami bukan sebagai representasi tunggal dari masa keemasan Islam, tetapi sebagai konstruksi historis yang merefleksikan ketegangan antara idealitas normatif dan realitas empiris. Kesadaran atas ketegangan ini penting untuk mendorong pembacaan sejarah yang lebih rasional, inklusif, dan relevan dengan tantangan umat Islam kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2021). Analisis Kritis Teori Dan Penerapan Konsep Khilafah Pasca Nabi Saw Wafat. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 4(1), 147–160. <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3492>
- Al Ayyubi, I. I., Fauziah, Z., Arifah, H., Hartati, R. D., & Herdiansyah, R. (2024). Studi Komparatif Dinamika Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 5(01), 73–92. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v5i01.141>
- Aldzakhiroh, N., Nopriansyah, B., Ramadhani, G. F., Mubaraq, Z., & Kholid, N. (2024). Political Dynamics of the Era of Ali Bin Abi Thalib (Contribution of the Political System in Islamic Civilization). *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 7(2), 152. <https://doi.org/10.30829/juspi.v7i2.18659>
- Anis, M. (2020). Perkembangan Politik Masa Al-Khulafa Al-Rasyidun. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 8(1), 52–72. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v8i1.204>
- Diyarti, S., Alkhendra, A., Efendi, E., & Khalida, A. (2024). Hadith Among Ahlussunnah and Shia. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.86>
- Ekaviana, N. A. (2021). Peralihan Kerajaan Islam Secara Damai Dari Hasan Bin Ali Kepada Muawiyah Bin Abi Sufyan. *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, 5(1), 83–105.
- Hariato, Y. A. (2023). Kredibilitas Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Meredam Perpecahan Umat Islam pada Peristiwa Saqifah Bani Saidah. *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 5(1), 69–88. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v5i1.253>
- Hidayat, M. T., Fauza, Z. L., & Rama, B. (2024). Proses Peralihan Kepemimpinan Dari Nabi Ke Khalifa Abu Bakar. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 162–168.
- Hosen, N. (2018). *Islam Yes Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah*. Suka Press.
- Junaidin. (2020). Pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan Permulaan Konflik Umat Islam: Peristiwa Tahkim. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 33–48. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1.227>
- Miftahur Ridho. (2019). Peristiwa Tahkim (Polemik Perselisihan Politik dan Implikasinya). *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman*, 5(1), 57–71. <https://doi.org/10.36835/humanistika.v5i1.147>
- Miftakhur Ridlo, & Moch. Yunus. (2022). Dialektika Sunni dan Syi'ah Dalam Pemikiran Politik Islam. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 50–64. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.846>
- Mokhammad Samsul Arif. (2020). MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 18–40. <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197>
- Mubarok, A., & Widiyanto, A. A. (2021). Tokoh agama dalam penyebaran hoax di whatsapp group (ditinjau dengan teori dominasi Max Weber). *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 204–213. <https://doi.org/10.17977/um063v1i2p204-213>
- Munawira, S., Hamriani, S., & Rama, B. (2024). Biografi Ali bin Abi Thalib. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 89–95.
- Musthafa, A. K. (2021). Studi Kritis Atas Narasi Sejarah Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam Historiografi Islam. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(2), 59–71. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i2.8253>
- Pratama, M. A. Q., & Sujati, B. (2018). Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1496>
- Purkon, A. (2023). Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Negara dalam Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(3), 1023–1036. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33925>
- Qomariah, R. N., & Aiman, U. (2022). Masa Peradaban Islam Khulafaur Rasyidin. *Tarbawi*, 10(2), 25–37.

<https://doi.org/10.62748/tarbawi.v10i02.82>

- Rahmad, A., & Santalia, I. (2025). ALIRAN PEMIKIRAN KEISLAMAN SYI'AH. *Studia Religia : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 9(01), 30–40. <https://doi.org/10.30651/sr.v9i01.25238>
- Rifky, S., Duryat, M., & Saddami, S. T. (2023). Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab. *Jurnal Keislaman*, 6(2), 311–325. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3897>
- Sari, T. N., & Pratama, Y. (2022). Kemajuan Islam Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq Sebagai Khalifah Pertama. *Danadyaksa Historica*, 2(2), 151–157. <https://doi.org/10.32502/jdh.v2i2.5671>
- Satiadharmanto, D. F., Safira, R., & Rahmiati, R.-. (2024). Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Penerapan Tahkim dalam Penyelesaian Konflik: Analisis Kasus Pertempuran Siffin dengan Pendekatan Hukum Empiris dan Perpektif Islam. *Marwah Hukum*, 2(2), 41–55. <https://doi.org/10.32502/mh.v2i2.8487>
- Sayfulloh, U. H., Afrizal, A., & Sawaludin, S. (2024). KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI KEPALA NEGARA: FONDASI KEPEMIMPINAN DAN PEMERINTAHAN ISLAM. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 3(2), 79–97. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.3598>
- Sriwahyuni, R. A., Salamat, N. S., Nugraha, S. P., & Parhan, M. (2023). Principles of Teaching of the Khawarij Group and its Impact to the Present. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 7(1), 72. <https://doi.org/10.30829/juspi.v7i1.15949>
- Zulfikar, & Santalia, I. (2024). Sejarah Munculnya Syiah dan Perkembangannya di Dunia Islam. *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 2(1), 19–24. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v2i1.956>